

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau nursery kelapa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Sebanyak 13.038.000 batang benih kelapa dalam intermediate perlu diverifikasi kebenarannya

Jakarta, BK – Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama melalui penguatan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain menjadi sumber pendapatan bagi petani, komoditas kelapa juga berperan sebagai penyedia bahan baku bagi berbagai industri pengolahan, sehingga turut mendorong peningkatan nilai tambah dan pengembangan peluang usaha pada sektor hilir.

Untuk memastikan kontribusi dari sektor tanaman kelapa ini dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan jaminan ketersediaan pasokan bahan baku yang memadai, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi kelapa nasional dari tahun ke tahun. Capaian produksi kelapa menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kinerja subsektor perkebunan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan langkah strategis untuk penguatan budidaya serta peningkatan produktivitas.

Sebagai gambaran, produksi kelapa pada tahun 2025 sebesar 2.766.260 ton, masih jauh dari kapasitas lahan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi kelapa nasional masih memerlukan penguatan langkah-langkah peningkatan produksi agar tercapai peningkatan produksi secara optimal. Untuk mendukung peningkatan prosuksi kelapa tersebut, Pemerintah antara lain pengadaan benih kelapa dalam skala besar.

Pada tahun 2025 Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan mengucurkan anggaran sebesar Rp. 312.912.000.000 (Rp. 24.000 per batang = 13.038.000 batang) untuk program benih bibit kelapa yang dibagikan kepada 15 kabupaten di Indonesia. Jika setiap hektar ditanami 100 batang kelapa maka akan ada 130.380 hektar kelapa yang baru ditanam di 15 kabupaten tersebut. Jika dirata-ratakan maka setiap kabupaten penerima akan menerima 869.200 batang bibit kelapa atau sama dengan 8.692 hektar kelapa yang baru ditanam.

Dari sisi penyerapan anggaran dan realisasi di lapangan perlu dilakukan verifikasi agar tidak terjadi kesia-siaan atau bahkan penyalahgunaan anggaran. Untuk mengetahui kebenaran realisasi penanaman 130.380 hektar kelapa bukankah perkara mudah. Dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit serta transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak diverifikasi dengan baik maka bisa saja laporan di atas kertas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Beberapa kabupaten penerima bibit kelapa tersebut antara lain Kabupaten Batang (Jawa Tengah), Kabupaten Demak (Jawa Tengah), Kabupaten Sumenep (Jawa Timur), Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), Kabupaten Mesuji (Lampung), Kbupaten Padang Pariaman (Sumatera Barat), Kabupaten Ende (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau), Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara) dan kabupaten lainnya yang disalurkan melalui kelompok tani setempat. (*Tim)*